

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN OLEH BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Herlina Martauli S.¹, Andri², Dedi Apriansah³, Kamaludin⁴, Tati Juriani⁵

^{1,2,3,4,5}Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang

Email: martauliherlina@gmail.com¹, andritft22@gmail.com², apriansahdedi16@gmail.com³, kamaludinaj@gmail.com⁴, tati.juriani13@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of road construction and maintenance by the National Road Implementation Center V in South Sumatra Province. The formulation of the problem in this research is how effective the implementation of road construction and maintenance by the National Road Implementation Center V in South Sumatra Province is. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Qualitative research procedures produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The approach is directed at the background and the individual holistically (whole). So, in this case it is not permissible to isolate individuals or organizations into variables or hypotheses, but it is necessary to view them as part of a whole, (Lexy J. Moleong, 2005: 4). The results of the study indicate that an increase in quantity will be related to output performance as well as controlling or controlling costs. The costs incurred for a road or bridge infrastructure program have been calculated based on existing studies. In addition, suitability in terms of length, width, implementation time and location will also be related to the use or utilization of roads in helping community activities in the social, economic and other fields. The quality and cost of road construction has supported economic growth both nationally and in the regions it passes through. Where the quality of construction of widening and strengthening structures, handling of segments that have been prone to accidents, as well as institutions through three steps will be carried out namely re-activating the foreman/road observer who will be included in the construction contract.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Construction and Maintenance of Roads

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, (Lexy J. Moleong, 2005: 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan kuantitas akan berkaitan dengan kinerja keluaran sekaligus mengendalikan atau pengatur biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk suatu program infrastruktur jalan ataupun jembatan telah diperhitungkan berdasarkan kajian yang ada. Selain itu pula kesesuaian baik dalam hal panjang, lebar, waktu pelaksanaan dan lokasi akan juga berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan jalan dalam menolong aktivitas masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi dan lainnya. Kualitas dan biaya pembangunan jalan telah mendukung pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah yang dilewatinya. Dimana kualitas pembangunan pelebaran dan perkuatan struktur, penanganan segmen yang selama ini rawan kecelakaan, serta kelembagaan melalui tiga langkah yang akan dilakukan yakni mengaktifkan kembali mandor/ pengamat jalan yang akan dimasukkan dalam kontrak konstruksi

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan prasarana transportasi sangatlah vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Prasarana tersebut menjadi pendorong bagi berputarnya roda perdagangan dan industri, dua hal yang menjadi inti dalam pembangunan bidang ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V memiliki wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi (provinsi Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, dan Lampung) dengan panjang jalan nasional 3.492,77 km.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015

tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan 1.600,16 km, Provinsi Kep. Bangka Belitung 600,40 km, dan Provinsi Lampung 1.292,21 km.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2014, 2010), sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu: tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang

maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum.

Satu kondisi nyata yang terlihat dari kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari kondisi kebutuhan akan jalan dan jembatan masih jauh dari harapan. Kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian untuk dicarikan solusi perbaikan dalam memahami ada yang menjadi akar permasalahan sehingga implementasinya tidak berjalan dengan baik.

Dengan memperhatikan urgennya permasalahan ini serta dalam upaya untuk mendapatkan solusi terbaik dalam implementasi kebijakan anggaran dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaan pembangunan jalan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan".

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Pustaka

1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif

apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Handyaningrat (1994:16) yang menyatakan bahwa: "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Pengertian yang hampir sama mengenai efektivitas yang dikemukakan Gibson dan kawan-kawan dalam Djoerban Wahid (1984:27) yaitu efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Menurut Peter Drucker, Stoner and Wankel dalam Wilhelmus W. Bakowatun (1986: 13-14) mengatakan bahwa efektivitas berarti "menjalankan pekerjaan dengan benar. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat".

Menurut Gibson et al. dalam Ardiani Nunuk (1989:50-51) yang mengemukakan beberapa kriteria untuk dapat menilai efektivitas. Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antara produktivitas, kualitas, efisiensi, *fleksibilitas*, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan

oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi
2. Karakteristik Lingkungan
3. Karakteristik Pekerja
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

2. Konsep Pembangunan

Menurut pengertian ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama (Todaro: 2008).

Tujuan dan manfaat pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya melanjutkan apa yang telah dibangun, membangun yang belum dibangun dan menambah bagian-bagian baru sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip pembangunan seperti ini yang perlu dilaksanakan dalam sebuah kepemimpinan di daerah.

Tiga tujuan inti pembangunan adalah (1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan, (2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan

penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, (3) perluasan rentang pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa, yakni membebaskan mereka dari ketergantungan (Todaro:2005).

Selain itu ada kaitan antara tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan pembangunan nasional dengan dimensi jangka waktu pendek dan panjang yaitu:

1. Tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek yang berhubungan dengan tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya.
2. Tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

3. Orisinilitas Penelitian

Penelitian terdahulu adalah kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang serupa dan memiliki tujuan yang sama dengan yang dinyatakan dalam judul penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun kerangka berfikir dan memperkuat hipotesis penelitian. Pada peneliti ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian dengan judul Efektivitas Pembangunan Jalan Kampung dalam Program “RESPEK” untuk pemberdayaan masyarakat di Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya yang merupakan tesis teknik pembangunan wilayah dan kota Universitas Diponegoro Semarang yang dibuat oleh Dady Permadi pada tahun 2009. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas pembangunan jalan kampung dalam program “RESPEK” untuk pemberdayaan masyarakat di Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya. Sasaran penelitian dilakukan dengan menganalisis tahapan pembangunan jalan kampung dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian dengan judul Evaluasi Program Pembangunan Jaringan Jalan Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan jurnal pasca Universitas

Hasanudin yang dibuat oleh Bakri N. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi jaringan jalan perdesaan terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dan mengevaluasi program pembangunan jaringan jalan perdesaan dengan melibatkan masyarakat melalui PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan).

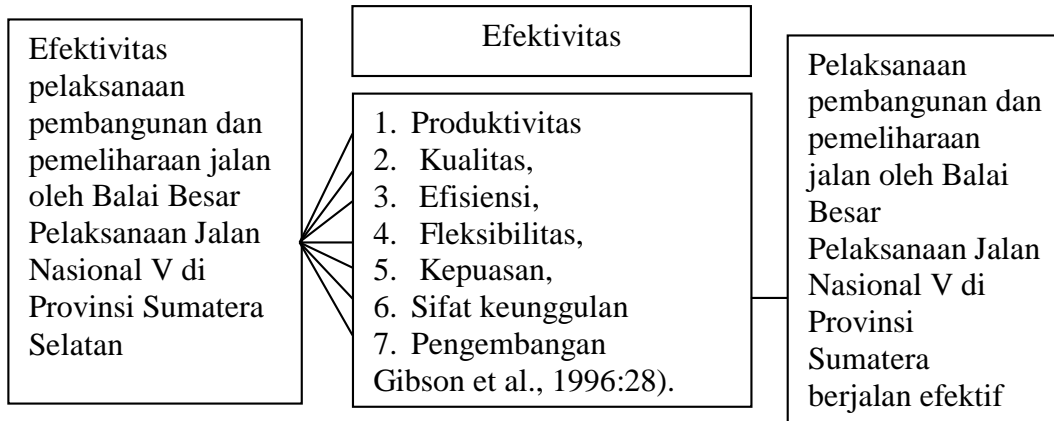
4. Kerangka Pemikiran

Peneliti dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program menggunakan teori Efektivitas dari Gibson et. al. dalam Ardiani Nunuk (1989:28) yang mengatakan bahwa efektivitas organisasi mendukung organisasi dalam lingkungannya. Kelangsungan hidup suatu organisasi merupakan ukuran jangka panjang dari efektivitas organisasi. Kelangsungan hidup membutuhkan adaptasi sejak organisasi dibentuk, dikembangkan, dewasa dan menurun berdasarkan kondisi lingkungan. Agar organisasi bertahan hidup maka Gibson menggunakan 5 kriteria jangka pendek yaitu produktivitas, mutu (kualitas), efisiensi, fleksibilitas, Kepuasan. 2 (dua) kriteria lainnya sifat keunggulan (persaingan) dan pengembangan mencerminkan efektivitas dalam priode waktu menengah.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka pikir yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini adalah:

Gambar 1

Skema Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya dengan efektivitas melalui teori yang dikemukakan Gibson menggunakan 5 kriteria jangka pendek yaitu produktivitas, mutu (kualitas), efisiensi, fleksibilitas, kepuasan. 2 kriteria lainnya sifat keunggulan (persaingan) dan pengembangan..

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan kepemilikan informasi yang kredibel tentang efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di

Provinsi Sumatera Selatan. Informan yang dimaksud adalah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Pejabat Pembuat Komitmen Preservasi dan Peralatan, serta kelompok sasaran seperti Kepala Bidang, Kepala Satuan Kerja, dan Bendahara Pengeluaran.

Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari pegawai, penduduk setempat yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berupa surat keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut:

- a). Tahapan memasuki lapangan (*getting in*).
- b). Tahapan ketika berada di lapangan (*getting along*)
- c). Tahapan keluar dari Lapangan (*getting out*)

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *triangulasi* sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Teknik analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dilaksanakan, yang dilanjutkan dengan mereduksi data yaitu proses pemilahan terhadap data yang diperoleh dilapangan, dimana data yang diperoleh melalui wawancara, observasi atau pengamatan yang sudah ditentukan dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, dan lain-lain dipilah serta diambil inti dari data tersebut untuk disesuaikan dengan keperluan peneliti, reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan itu

dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori dilakukan sambil membuat penandaan (*coding*) yang akhirnya mengadakan pemeriksaan kembali keabsahan hingga ke tahap penafsiran data. tahap selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dan pada akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan.

Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dengan waktu penelitian selama 6 bulan dari bulan oktober sampai bulan maret

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdirinya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dari Balai III ke Balai V Provinsi Sumatera Selatan berawal dari usulan penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berawal dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang perubahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam perkembangannya Peraturan Menteri ini mengalami beberapa kali perubahan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan bidang ke PU-an, kewenangan serta tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Marga yang antara lain perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa. Pelaksanaan kebijakan ini meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa. Balai Besar PJN dalam kedudukannya sebagai unit pelaksanaan teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala, dan tugasnya adalah melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan system manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan serta penatausahaan balai.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V merupakan Balai Besar tipe B. Susunan

organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Kerja
- b. Bendahara Pengeluaran
- c. Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
- d. Penanggungjawab Unit Akuntansi Satuan Kerja
- e. Petugas e-monitoring Satuan Kerja
- f. Pelaksanaan Teknik/ Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan
- g. Pelaksanaan Teknik/ Asisten program, rencana, dan administrasi teknik.
- h. Penelaah BMN/Asisten pengelola Barang Milik Negara
- i. Penelaah Data Keuangan/ Asisten Keuangan, Umum, dan Pelaporan

2. Pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar PJN V Di Provinsi Sumatera Selatan

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar PJN V di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang diperoleh dalam penulisan ini berasal dari wawancara dan observasi di lapangan.

2.1. Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Dalam menganalisis variabel efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan, penulis melakukan analisis terhadap data dan informasi efektivitas pelaksanaan pembangunan jalan yang penulis peroleh dari lokasi penulisan, dengan berpedoman kepada dimensi dari kuantitas, kualitas, biaya dan dampak.

2.1.1. Kuantitas

Dalam dimensi kuantitas terdiri dari 4 indikator, yaitu lebar jalan, panjang jalan, kesesuaian waktu, dan kesesuaian lokasi. Data yang diperoleh menunjukkan adanya tidak semuanya mengakui akan adanya kesesuaian.

Untuk mencapai tingkat efektivitas diperlukan adanya kemampuan melihat kebijakan secara objektif, serta konsisten dalam melaksanakan kebijakan, melaksanakan kebijakan secara fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, kebijakan dinilai sebagai perintah yang mesti direalisasikan,

Peningkatan kuantitas akan berkaitan dengan kinerja keluaran sekaligus mengendalikan atau pengatur biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk suatu pelaksanaan

infrastruktur jalan ataupun jembatan telah diperhitungkan berdasarkan kajian yang ada. Selain itu pula kesesuaian baik dalam hal panjang, lebar, waktu pelaksanaan dan lokasi akan juga berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan jalan dalam menolok aktivitas masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi dan lainnya.

2.1.2. Kualitas

Kualitas dalam efektivitas pelaksanaan pembangunan jalan berkaitan dengan ketebalan, kekerasan sesuai dengan standar yang ditentukan dan sesuai dengan kondisi lokasi yang ada. Pembangunan jalan perlu untuk disesuaikan dengan standar yang ditentukan agar jalan yang telah di bangun dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tingkat kekerasan jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas keberhasilan pelaksanaan pembangunan wilayah. Pemerintah melalui kebijakan alokasi anggaran dalam APBN berupaya agar secara bertahap jalan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan diperbaiki serta berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa baik ketebalan, kekerasan maupun kesesuaian dengan kondisi lokasi belumlah sesuai dengan yang di tetapkan.

Dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi maka strategi yang perlu

dilakukan ke depan masih mengutamakan mempertahankan kinerja jalan agar jangan sampai terjadi penurunan kualitas, pelebaran dan perkuatan struktur, penanganan segmen yang selama ini rawan kecelakaan, serta kelembagaan melalui tiga langkah yang akan dilakukan yakni mengaktifkan kembali mandor/ pengamat jalan yang akan dimasukkan dalam kontrak konstruksi, membentuk kelompok swakelola, serta ada pola baru dalam tender dengan memasukan periode garansi dan kontrak berbasis kinerja. Melalui upaya ini diharapkan pencapaian efektivitas pelaksanaan dapat tercapai.

2.1.3. Biaya

Biaya merupakan aspek yang selalu dikait-kaitkan dengan kekuatan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang.

Efektivitas pelaksanaan dalam kaitannya dengan biaya berdasarkan data lapangan diperlukan untuk pertimbangan kewajaran dalam proses penggunaan anggaran sebagai cerminan dari disiplin anggaran yang bertujuan untuk mengurangi ketidak seimbangan antara apa yang terjangkau berdasarkan pertimbangan ekonomi, perkiraan pendapatan, besaran belanja serta kewajiban-kewajiban yang mengikat pemerintah untuk dilakukan.

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat.

Proses pelaksanaan APBN akan terlihat dari indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan *value for money* (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberikan manfaat pada efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran dan alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan meningkatkan *public cost awareness* sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. VFM tersebut harus

dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Akuntabilitas publik merupakan kata kunci, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

2.1.4. Dampak

Dalam dimensi dampak mempermudah transportasi dibangunnya infrastruktur jalan telah mempermudah transportasi di daerah. Dampak mengacu pada bagaimana manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya pembangunan jalan yang di bangun. Suatu pelaksanaan dikatakan efektif ketika pelaksanaan tersebut memberikan manfaat bagi yang menerimanya dalam hal ini masyarakat.

Pembangunan jalan akan menghubungkan desa yang satu dengan desa

yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, membuka wilayah yang terisolir, mempermudah transportasi. Aktivitas dan mobilitas orang, barang dan jasa akan semakin cepat ketika sarana berupa jalan dapat difungsikan dengan baik. Akan tetapi dengan besaran anggaran yang cukup besar ketika suatu pembangunan tidak dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat maka menjadikan Pelaksanaan tersebut tidak efektif.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jalan bukan dilihat dari terbangunnya sarana jalan akan tetapi berfungsinya sarana tersebut bagi penggunaannya. Efektivitas pelaksanaan pembangunan jalan diarahkan pada penciptaan manfaat yang secara langsung terukur kepada masyarakat sehingga mampu menjadi media sarana prasarana dalam mempercepat aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan maupun kemasyarakatan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi kuantitas yang terdiri dari lebar jalan, panjang jalan, kesesuaian waktu, dan kesesuaian lokasi sudah sesuai dengan perencanaan awal,

kualitas pembangunan jalan berkaitan dengan ketebalan, kekerasan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dan sesuai dengan kondisi lokasi yang ada, Transparansi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan sudah menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat dan, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat sudah terpenuhi. Dampak dibangunnya infrastruktur jalan telah membuka akses jalan yang terisolir di daerah, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

2. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian maka disarankan beberapa hal sebagai berikut (1) Perlu lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan yang dianggarkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.

2.1 Saran Praktis

1. Perlu penyusunan program pembangunan jalan yang jelas dan berkesinambungan.
2. Perlu mengaktifkan kembali pengawas/pengamat jalan yang akan dimasukkan dalam kontrak konstruksi, membentuk kelompok swakelola, serta ada pola baru dalam tender dengan memasukan periode garansi dan kontrak berbasis kinerja.

3. Perlu pendidikan dan pelatihan penggunaan anggaran terutama anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan.
4. Perlu penerapan aturan yang berkaitan disiplin anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick.al. 1989. (Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Drucker, Petter. 1977. *The Organization of the future*. New York USA : McGraw-Hil book Company.
- Dunn, William, N, 1994, *Public policy Analysis: An Introdrukctian*, Second Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Int. Inc.
- Dwiyanto, A, 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, 20 Mei 1995. Yogyakarta: FISIPOL UGM,
- Ediharsi, Weny Darta Taihr, Husna Rosa, dan Syahmdin. 1998. *Praktek Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia*. Jumal Ekonomi dan Manajemen (Vol. 6. No.1): 69-1 13.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program; Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, Surakarta: Pustaka Cakra.

- Fauzi, Akhmad, 2006, *Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gibson, J. L., Ivancevich M. J., Donnelly, Jr, 1988, *Organisasi dan Manajemen* (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Gogging, Malcolm L, Ann O'M. Bowman, James P.Lester, and Laurence J. O'Toole Jr. 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. London: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education
- Grindle, Merilee S., 1980., *Politics and Policy Implementation in the Third World.*, New Jersey: Princeton University Press
- Hadi, S, 1989. *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Desertasi*, Jilid III, Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: Andi Offset.
- Handoko, Hani T. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hagul, J,N. 1982. *Metode Research Untuk Para Peneliti*. Yogyakarta: UGM.
- Hasibuan, Melayu, S.P. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara, Masalah-masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hersey, Paul, dan Kenneth H. Blanchard. 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*, Penerjemah: Agus Dharma, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hill Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London: Sage Publications.
- John and Robert V. Presthus. 1960. *Public Administration*. New York: The Ronald Press
- Jones Charles O. 1984. *Pengantar kebijakan Publik (Public Policy)* Edition Nashir Budiman. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho, J. R., 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Kartiwa, Asep. 2004. *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan arah kebijakan umum*. Makalah disampaikan pada pelatihan pendalaman kompetensi bidang tugas legislatif anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 8 Desember 2004.
- Kast, Fremont, E dan James, E. Rosenzweig. 1982. *Organisasi dan Manajemen*, Terjemahan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keban, J.T. 1995, "Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan," Seminar sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995,. Yogyakarta : Fisipol UGM.

- Kerlinger, F.N dan Pedhazur, E.J, 1987. *Korelasi Dan Analisis Regresi Ganda*, Semarang: Nur Cahya.
- Kiranajaya, W., 2000, “*Analisis Keuangan Daerah: Pendekatan Makro*” Model Program PMSES, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Kerja Sama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Koswara, E., 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*, Analisis CSIS XXIX, No. 1, 51 – 52.
- Lane, 1993, *The Public Sector, Concepts, Models, and Approach*, Printicenton, New Jersey: University Press.
- Lenvine Charles. 1990. *Public Administration: Challenges, Choice, Consequences*. Glenview Illinois: Scott Foreman/Little Brown Higher Education.
- Lindblom, Charles E., 1980, *Proses Penetapan Kebijakan ; edisi kedua*, Alih Bahasa: Ardian Syamsudin, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, 2001. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah*. Batam: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
- Martin, Lawrence L dan Kettner, M Peter, 1996, *Measuring The Performance of Human Service Programs*, London New Delhi, California: International Educational and Professional Publisher Thousand Oaks.
- Martoyo Susilo., 1992, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEE.
- Masrun, 1981, *Reliabilitas dan Cara Menentukannya*. London New Delhi, California: UGM.
- Mazmanian Daniel A dan Sabatier Paul A. 1983, *Implementation and Public Policy*. Grenview Illinois : Scott Foresman and Company
- Mitchell, T.R. 1978. *People In Organisasi Under Standing The Behaviors*. New York: McGrow-Hill.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B Musgrave. 1991. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore: Mc Graw – Hill Book Co.
- Mustopadidjaja, 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Duta Pertiwi Foundation.
- Ndraha, Talisiduhu, 1996. *Budaya Pemerintahan dan Dampaknya terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat: Sebuah studi tentang Majaemen Pemerintahan DKI Jakarta mengantisipasi Implementasi UU Nomor 11 Tahun 1990*, Jakarta : jurnal MIPI Edisi ketiga. 1997, Budaya Organisasi. Jakarta: Reneka Cipta.
- Nunnally, J. C. 1970. *Introduction To Psycological Measurement*. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- Osborne, David, & Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government*. New York A William Patrie Book.

- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *"Kebijakan Kinerja Karyawan"*, Yogyakarta: BPFE.
- Riggs, Fred W., 1988, *Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis*, Diterjemahkan oleh: Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosadi, Dedi, 2007, *Filsafat, Teori, dan Pendekatan Sistem*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Rosenblom, David H. and Robert S. Kravchuk, 2005, *Public Administration: Understanding Management, Politics, And Law In The Public Sector*, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian. 1986. *Top Down and Bottom Up Approach to Implementation Research*, in Journal of Public Policy
- Saefullah Djadja H. A. 2008. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan kedua. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.
- Siagian, S.P., 1995, *"Manajemen Strategik"*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Sidik, M., 2001. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Proses Otonomi Daerah*, Makalah Seminar, Workshop "Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah" yang diselenggarakan oleh Sustainable Indonesian Growth Alliance (SIAGA) bekerja sama dengan STIEKERS, 24 Maret 2001, Yogyakarta.
- Smith Thomas B. 1973. *The Policy Implementation Process*. Policy Sciences 4, pp 197-209. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam: Printed in Scotland.
- Soenarko, 1998, *Public Policy ; Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya : Papyrus.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Supriyatna, Tjahya. 1999. *Legitimasi Pemerintahan Dalam Konteks Administrasi Publik Memasuki Era Indonesia Baru; Manajemen dan Organisasi Publik Serta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Maulana.
- Steers, Richard. M, 1985, *Efektifitas Organisasi* (diterjemahkan oleh Dra. Magdalena Jamin) dari Judul Asli: *Organizational Effectiveness, A Behavioral View*, Jakarta: Kerjasama LP2M dan Penerbit Erlangga.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Taufik Dedi. 2011. *Pengaruh Sistem Penganggaran Terhadap Efektivitas Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Jawa Barat. (Studi Tentang Penyusunan Program*

- Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pada Wilayah I dan Wilayah III di Jawa Barat*). Bandung: PPs. Unpad.
- Thoha, Miftah. 1989. *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Thompson, John L.. 1990. *Strategic Management: Awareness and Change*, London: Chapman and Hall.
- Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in Administration and Society*, Volume, 6 No. 4, Sage, Beverly Hills.
- Wahab, Solihin, Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.